



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KOMISI X DPR RI  
KE KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN  
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 29 S.D 31 JANUARI 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
4. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Perpustakaan.
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Undang-Undang No.3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.
8. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
9. PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
10. Perpres Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4 dan Pasal 174.
12. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Kota Cilegon Provinsi Banten ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam bidang Pendidikan di jenjang Pendidikan dasar dan menengah. Adapun tujuan umum kunjungan ini yaitu mengetahui gambaran umum kondisi Pendidikan di Kota Cilegon dan secara khusus untuk mendapatkan data capaian dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait relaksasi penggunaan dana BOS akibat pandemi *Covid-19*, Pendidikan Jarak Jauh, program bantuan kuota internet, dan persiapan Asesmen Nasional 2021.

### **C. TIM KUNJUNGAN KERJA**

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Cilegon Provinsi Banten dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI, H. Syaiful Huda dengan didampingi oleh pejabat Kemendikbud RI, Dr. M. Samsuri, S.Pd., MT selaku Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud RI dan Sri Wahyuningsig, M.Pd. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu.

### **D. AGENDA KUNJUNGAN KERJA**

Agenda kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Kota Cilegon Provinsi Banten, yaitu

1. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, mewakili Wali Kota Cilegon, yang dihadiri oleh:
  - a. Bappeda Kota Cilegon
  - b. Anggota DPRD Kota Cilegon
  - c. Dewan Pendidikan Kota Cilegon
  - d. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Cilegon
  - e. Pengurus Ikatan Guru Indonesia Kota Cilegon
  - f. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kota Cilegon
  - g. Pengurus Ikatan Penilik Kota Cilegon
  - h. Perwakilan Pengawas Sekolah Kota Cilegon
  - i. Perwakilan LPMP Kota Cilegon
  - j. Perwakilan Komite Sekolah dari beberapa satuan pendidikan.
  - k. Perwakilan Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) Kota Cilegon
2. Kunjungan Ke SMPN 2 Kota Cilegon

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI**

#### **1. Umum**

- a. Visi Kota Cilegon adalah terwujudnya Kota Cilegon yang unggul dan sejahtera berbasis industri perdagangan dan jasa. Sedangkan misinya adalah memantapkan kemandirian perekonomian daerah, memantapkan lingkungan kota yang asri dan lestari, memantapkan kualitas SDM dan peningkatan kesejahteraan sosial, memantapkan pelayanan sarana dan prasarana kota, dan memantapkan tata kelola Pemerintah.
- b. Lima agenda pembangunan Kota Cilegon antara lain: agenda Cilegon mandiri, agenda Cilegon sehat dan cerdas, agenda Cilegon bersih dan asri, agenda Cilegon nyaman, dan agenda Cilegon berwibawa.
- c. Capaian SPM Pendidikan meliputi APM dan APK adalah sebagai berikut:

No	Indikator Program	Satuan	Tahun 2019		
			Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS (0-6 tahun)	%	8,87	8,65	97,52%
2	APK PAUD usia 3-6 tahun(RENSTRAN KEMDIKBUD)	%	43,6	39,19	89,89%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA	%	36,96	34,16	92,42%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%	115,35	105,58	91,53%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	%	100,47	92,98	92,55%
3	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/ MI	%	0,25	0,15	60,00%
4	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100,00%
5	Rata - rata lama sekolah (RLS)	Tahun	10,67	9,73	91,19%
6	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,43	13,13	90,99%
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB	%	107,3	107,99	101,00%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	%	94,94	90,33	95,00%
3	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/ MTs	%	0,11	0,28	255,00%
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100	100	100,00%

- d. Isu strategis Kota Cilegon 2016-2021 antara lain: kualitas dan daya saing perekonomian, penataan ruang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial, peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, dan fasilitas kota, peningkatan daya dukung dan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum.
- e. Strategi dan arah kebijakan pada misi ketiga adalah memantapkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sasaran bidang Pendidikan Kota Cilegon antara lain: terwujudnya peningkatan pelayanan Pendidikan yang merata, terjangkau, bermutu, relevan dan kompetitif bagi masyarakat.
- f. Strategi bidang Pendidikan Kota Cilegon antara lain: memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan Pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan dan informal; memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu; memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan

pendidikan dasar yang merata, terjangkau, bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan; memperluas cakupan beasiswa dan meningkatkan kualitas tenaga profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

## 2. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cilegon

- a. Arah kebijakan bidang Pendidikan Kota Cilegon antara lain: pembinaan dan pengembangan serta pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan dan pendaftaran lulusan Pendidikan kesetaraan; penyelenggaraan Pendidikan kemasyarakatan; pembangunan Pendidikan dasar yang berkualitas; penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung serta bantuan biaya Pendidikan bagi satuan Pendidikan dasar; penyediaan dan pemenuhan sarana serta fasilitas pendukung pembelajaran satuan Pendidikan dasar; pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik Pendidikan dasar, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi; pemberian biaya bantuan Pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan, kualitas serta karir bagi guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan dan pelatihan, penyediaan kelengkapan bekerja bagi pamong belajar serta TDL, fasilitas untuk sertifikasi.
- b. Dinas Pendidikan Kota Cilegon, memiliki program Sekolah Mantap yang merupakan program prioritas daerah Kota Cilegon, dengan jumlah 8 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Mantap ini merupakan perwujudan sekolah yang memiliki keunggulan dan juga memiliki tugas untuk membantu transformasi pengembangan ke sekolah lainnya yang ada di wilayahnya, dilingkup kecamatan.
- c. Jumlah ruang kelas dan siswa di Kota Cilegon terdiri dari:

Sekolah	Ruang Kelas	Siswa
SD Negeri	1.304	38.023
SMP Negeri	239	7.641
SMP Swasta	349	6.627

Rasio Ruang Kelas terhadap siswa, yaitu SD : 28,51% dan SMP: 29,30 %

- d. Alokasi anggaran Pendidikan di Kota Cilegon, yaitu:

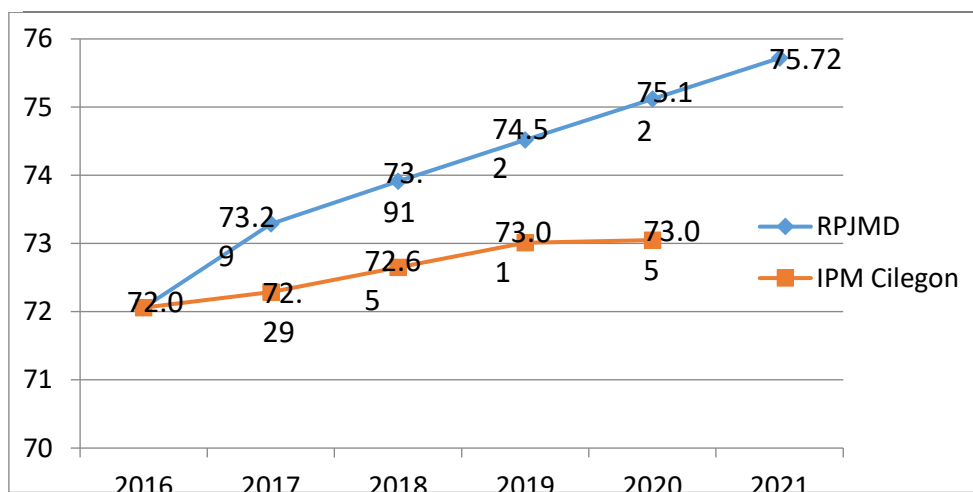
Tahun	Prosentase
2018	21,83%
2019	22,75%
2020	20%

e. Data Pendidikan Daerah

JENJANG	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH PENDIDIK	JUMLAH TENDIK	JUMLAH RUANG KELAS	JUMLAH ROMBEL
PAUD	243	10.852	1.301	284	612	830
SD	181	46.837	2.366	96	1.511	1.622
SMP	44	14.146	845	169	507	488
SMA	23	6.716	511	87	257	241
SMK	25	12.001	620	130	304	395
SLB	4	263	34	2	32	97

- f. Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon dan realisasi IPM terhadap target RPJMD Tahun 2013-2020, dalam tiga tahun terakhir, sebagai berikut:

Kab/Kota di Banten	Indeks Pembangunan Manusia		
	2020	2019	2018
Kota Cilegon	73,05	73,01	72,65
Kab Pandeglang	65,00	64,91	64,34
Kab Lebak	63,91	63,88	63,37
Kab Tangerang	71,92	71,93	71,59
Kab Serang	66,70	66,38	65,93
Kota Tangerang	78,28	78,43	77,92
Kota Serang	72,16	72,10	71,68
Kota Tangerang Selatan	81,36	81,48	81,17
Prov Banten	72,45	72,44	71,95



IPM Kota Cilegon di Provinsi Banten Tahun 2020

- g. Beberapa tantangan Pendidikan antara lain menekan angka putus sekolah, Pendidikan kesetaraan, meningkatkan kualitas layanan Pendidikan berstandar nasional, metode pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan meningkatkan dan memperluas cakupan program beasiswa. Sedangkan optimalisasi pendidikan di Kota Cilegon antara lain peningkatan pelayanan Pendidikan yang merata,

terjangkau, bermutu, relevan dan kompetitif bagi masyarakat; menuntaskan prioritas daerah (sekolah mantap) pemerataan; pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik Pendidikan dasar serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap Pendidikan tinggi; mengembangkan pembelajaran multimedia interaktif.

- h. Capaian indikator Kinerja RPJMD 2016-2021 sesuai dengan misi ke 3, yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial, dengan penjelasan data sebagai berikut:

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Pendidikan
2016	9,68	13,11	80%
2017	9,69	13,12	99%
2018	9,73	13,13	99%
2019	9,74	13,15	100%
2020	9,87	13,16	100%
Target 2021	11,08	15,04	100%

- i. Layanan Pemerintah Kota Cilegon dalam menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan: mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuka penerimaan CPNS atau PPPK; mengangkat TKK, THL, dan TKS sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas yaitu dengan cara pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah dengan anggaran yang bersumber dari APBD kota Cilegon dan Dana alokasi Khusus (DAK) serta dana Insentif Daerah (DID). Pengembangan akses belajar meliputi rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, pembebasan SPP dan DSP bagi siswa di sekolah negeri, pemberian bantuan beasiswa miskin bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta dan beasiswa dari CSR DU/DI.
- j. Peranan APBD dalam mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh:
1. Penyediaan WIFI gratis di 399 titik yang tersebar di setiap kelurahan.
  2. Pengadaan laboratorium komputer.
  3. Pengadaan papan tulis interaktif
  4. Pelatihan bagi tenaga pendidik dalam pembuatan bahan ajar Pembelajaran Jarak Jauh.
  5. Pelatihan bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian jarak jauh.
  6. Mengaktifkan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- k. Permendikbud 19 tahun 2020 merupakan relaksasi penggunaan dana BOS untuk mendukung pelaksanaan proses Pendidikan akibat

pandemi Covid-19, digunakan untuk: 1) Pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan Pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; 2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan yaitu pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*). Masker atau penunjang kebersihan lainnya; 3) Pembiayaan pembayaran honor bagi tenaga honorer.

- I. Bantuan kuota internet untuk PJJ dari Kemendikbud RI pelaksanaannya dapat berjalan lancar, dengan beberapa tahapan:
  1. Pendataan dan verifikasi nomor ponsel.
  2. Verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler.
  3. Penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
  4. Pemutakhiran nomor ponsel.
  5. Pemanfaatan bantuan kuota internet ini bagi peserta didik dan tenaga pendidik sangat membantu dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
  6. Ada 2 jenis kuota umum ialah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sementara kuota belajar hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran yang tercantum pada website <http://kulota-belajar.kemendikbud.go.id/>
  7. Harapan guru, siswa, dan orangtua bahwa bantuan kuota internet ini dapat dilanjutkan atau diperpanjang selama pandemi belum selesai.Mengenai PJJ ini, Dinas Pendidikan Kota Cilegon juga melakukan kerja sama, dengan melibatkan PGRI, IGTKI, HIMPAUDI, IGI dan perguruan tinggi.
  
- m. Dalam hal Asesmen Nasional, persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam pelaksanaan asesmen nasional, yaitu: **1)** Sosialisasi tentang Asesmen Nasional kepada kepala sekolah dan guru, berupa Asesmen Kompetensi Minimal (AKM), survey karakter, dan survey lingkungan belajar; **2)** pemenuhan sarana komputer dan jaringan internet; **3)** Pendataan peserta Asesmen Nasional, yaitu kelas 5 SD, kelas 8 (2 SMP), dan kelas 11 SMA/SMK; **4)** Pelatihan pembahasan soal AKM (literasi dan numerasi) bagi guru dan siswa. Selain itu, dilakukan juga pelatihan proktor dan teknisi, serta uji coba soal-soal AKM kepada siswa.

## **B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN**

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Cilegon untuk pelaksanaan dan mengembangkan akses Pembelajaran Jarak Jauh adalah sebagai berikut:
  - a. Belum semua wilayah di Kota Cilegon memiliki akses internet yang baik atau adanya kendala koneksi internet yang kurang memadai, terutama untuk daerah pegunungan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon menyampaikan keterangan lebih lanjut, bahwa meskipun Kemendikbud RI telah memberikan bantuan kuota untuk siswa, namun karena ketiadaan tower Telkom mengakibatkan PJJ tidak

dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, Guru menggunakan metode *blended learning*. Dalam 1 kelurahan ada 10 titik pertemuan tatap muka.

- b. Masih ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP/laptop dan kuota internet untuk mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh, sehingga sering pinjam ke saudaranya.
  - c. Pendampingan orangtua/wali siswa dirumah saat Pembelajaran Jarak Jauh kurang maksimal.
  - d. Kesenjangan capaian pembelajaran disebabkan perbedaan akses dan kualitas selama PJJ, terutama untuk anak dari sosial skonomi berbeda.
  - e. Ketidaktimalan pertumbuhan yaitu kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas (PAUD).
  - f. Resiko "*learning loss*" yaitu hilangnya pembelajran secara berkepanjangan beresiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter.
  - g. Anak mengalami streses terlalu lama belajar dari rumah, karena kurang sosialisasi.
  - h. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan melalui PJJ di masa pandemi Covid-19 ini memiliki beberapa dampak, antara lain terjadinya penurunan kemampuan akaedmik siswa dan terganggunya hubungan antar manusia karena kurangnya sosialisasi.
2. Beberapa kendala dalam mengimplementasikan penggunaan relaksasi dana BOS, antara lain masih ada siswa yang tidak memiliki HP atau laptop/PC, sehingga masih difasilitasi dengan pembelajaran secara luring sebagai solusinya, dan ini berdampak terhadap perlu adanya guru yang harus siap melakukan pembelajaran dengan metode luring kepada peserta didik di tengah kondisi pandemi saat ini. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih ada guru tenaga honorer terkendala belum tercatat dalam Dapodik, sehingga tidak bisa mendapat honor yang bersumber dari dana BOS.
  3. Kendala dalam pelaksanaan persiapan Asesmen Nasional, antara lain kondisi masa pandemi Covid-19 yang belum selesai, sehingga mengganggu pelaksanaan asesmen nasional, dan Dinas Pendidikan mendapatkan informasi bahwa kemungkinan waktu asesmen nasional diundur, sehingga hal ini membutuhkan perencanaan kembali dalam pelaksanaannya di Kota Cilegon.

### **C. PEMBAHASAN**

Selama kunjungan kerja di Kota Cilegon, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur Pemerintah maupun organisasi/lembaga Pendidikan, dan kunjungan lapangan SMPN 2 Cilegon, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, serta pejabat dari Kemendikbud RI, antara lain:

1. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan secara umum, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan dan program-program



Pemerintah Kota Cilegon dalam memajukan pendidikan, utamanya program Sekolah Mantap yang ada di setiap kecamatan. Dalam pandangan tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI, Sekolah Mantap ini merupakan program yang hampir sama dengan sekolah penggerak yang saat ini sedang digalakkan oleh Kemendikbud RI melalui kebijakan Merdeka Belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa program sekolah penggerak sebelum diprogramkan oleh Kemendikbud RI, sebetulnya sudah ada dan diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

2. Program lain yang mendapatkan apresiasi tim kunjungan kerja adalah penerapan SIRAVEK bagi sekolah-sekolah. SIRAVEK merupakan akronim dari *Sehat, Inovatif, Religius, Aman, Vokasional, Etika dan Kompetitif*, dengan penjelasan sebagai berikut: **S** berarti sekolah sehat, hal ini diindikasikan oleh adanya UKS di beberapa sekolah yang memenuhi standar Covid, dengan jumlah bed yang memenuhi standar dan jumlah yang menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Pemberian obat cacicung kepada peserta didik di sekolah agar peserta didik terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh cacicung. Tidak hanya itu, pemberian vaksin juga diberikan oleh sekolah dengan bekerjasama dengan Puskesmas terdekat. **I** berarti inovatif, artinya adanya inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan sekolah lain, misalnya sekolah Raudhatul Jannah, sekolah Al-Azhar, dan sekolah al-Hanif. **R** berarti religius, artinya pendidikan di Kota Cilegon diukur dari adanya standar Pendidikan sekolah pesantren. **A** berarti aman, artinya sekolah di Cilegon merupakan sekolah yang siaga bencana (gempa bumi, banjir dan tsunami) dan aman dari pencemaran lingkungan. Bagi sekolah yang menjadi langganan banjir, diusahakan agar file file penting diletakkan ditempat yang aman. **V** berarti vokasional, ini artinya program vokasi menjadi prioritas utama bagi pengajaran di sekolah. **E** berarti etika, artinya akhlaqul karimah menjadi tujuan bagi Pendidikan di Kota Cilegon. Hal ini diperoleh melalui kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap pagi hari. Terakhir huruf **K** berarti kompetitif, indikasinya peringkat pendidikan Kota Cilegon mendapat peringkat kedua di Banten, setelah Kota Tangerang Selatan.
3. Dengan banyaknya industri yang ada di Cilegon, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengharapkan agar ada kerja sama yang baik antara pendidikan dan industri, khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan kerja di industri yang ada di Cilegon. Lebih jauh, agar pendidikan Cilegon menjadi model integrasi dunia Pendidikan dan industri, serta harus mampu membangun orchestra, kolaborasi dan kerja sama antara *stake holders* pendidikan di Kota Cilegon, termasuk menggandeng dunia industri melalui CSR.
4. Dalam penyelenggaraan Pendidikan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI juga menyampaikan perlu adanya pengarusutamaan kebudayaan dan melakukan integrasi pendidikan dan kebudayaan, mengingat Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari aspek kebudayaan,

khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan Pendidikan, terdapat beberapa tanggapan dan masukan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang antara lain menyampaikan bahwa peserta didik di Kota Cilegon memiliki antara lain prestasi dalam bidang akademik, karate, dan menyanyi. Terkait kondisi pandemi ini, hal terpenting dalam pembelajaran selama masa pandemi antara lain adanya ketuntasan belajar dan tersampainya materi pelajaran. Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan, meskipun Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) telah dihapuskan namun Dinas Pendidikan Kota Cilegon berkomitmen agar sekolah-sekolah dapat memaksimalkan kemampuannya agar setara dengan SBI, dan kami wujudkan dalam bentuk sekolah MANTAP, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. SMPN 2 Cilegon yang dikunjungi Komisi X DPR RI merupakan salah satu sekolah MANTAP, yang dibangun dengan 2 lantai karena keterbatasan lahan. Permasalahan lahan ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi SMP N 2 Cilegon, dan beberapa sekolah lainnya di Cilegon, karena terbatasnya lahan.

Sementara Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud RI menyampaikan pandangan antara lain bahwa SMP N 2 Cilegon merupakan model dan cikal bakal sekolah penggerak. Mengenai aspirasi agar tunjangan guru melekat pada gaji, perlu disampaikan bahwa hal ini bukan merupakan ranah kewenangan Kemendikbud RI, melainkan kewenangan KemenPAN RB. Namun demikian, Kemendikbud RI akan mendorong agar tunjangan guru dapat dibayarkan melalui dana transfer daerah. Selain itu, dalam hal pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud RI saat ini sedang mendorong agar LPDP dapat memberikan program beasiswa untuk guru sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi guru.

#### **D. MASUKAN DAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN**

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan yang dilakukan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mendapatkan masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan Pendidikan, antara lain:

1. Kepala Dinas Pendidikan mengharapkan agar DAU bagi Kota Cilegon di tambah, agar bisa membantu anggaran Pendidikan di Kota Cilegon. Adapun mengenai PPPK, Dinas Pendidikan mengusulkan agar guru yang masih bisa mengikuti PNS maka diperbolehkan untuk menjadi PNS, tidak hanya ditempatkan atau diberikan peluang sebagai PPPK.
2. Perwakilan PGRI dan Pengawas Sekolah menyampaikan pandangan dan usulan agar tunjangan guru melekat dengan gaji bulanan, karena selama ini pembayaran tunjangan guru selalu telat. Selain itu, dari unsur pengawas mengusulkan adanya kenaikan tunjangan pengawas.
3. Tunjangan terhadap Kepala Sekolah dan Pengawas masih melekat kepada tunjangan sebagai guru. Oleh karena itu, tunjangannya kedepan agar melekat kepada jabatannya, bukan sebagai guru.
4. Ikatan Guru Indonesia menyampaikan telah berkontribusi dalam memberikan berbagai pelatihan peningkatan kompetensi keguruan dan menerbitkan beberapa buku pedoman pengajaran. Oleh karena itu, IGI

menyampaikan aspirasi agar IGI mendapatkan dukungan untuk terus melakukan pelatihan secara virtual di seluruh Indonesia serta diakuinya sertifikat pelatihan dari IGI.

5. Ikatan Penilik Indonesia Kota Cilegon, menyampaikan usulan agar Perpres Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Fungsional Penilik, ditinjau kembali. Perpres ini mengatur mengenai kesejahteraan penilik. Aspirasi dari penilik antara lain agar ada peningkatan kesejahteraan penilik dan agar penilik mendapatkan dana sertifikasi.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi di atas, dari berbagai pertemuan dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Cilegon Provinsi Banten dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kondisi dan perkembangan pendidikan di Kota Cilegon, khususnya pada jenjang pendidikan dasar cukup baik, termasuk program-program dari Kemendikbud RI seperti relaksasi BOS dan bantuan kuota internet, telah mampu dilaksanakan dengan baik. Adapun dalam implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Persiapan Asesmen Nasional masih ditemukan kendala. Diantara kendala dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh adalah keterbatasan sarpras IT yang dimiliki peserta didik dan orang tuanya, serta terbatasnya jaringan di beberapa wilayah, seperti pegunungan. Mengenai persiapan Asesmen Nasional, terkendala yaitu kurang maksimalnya persiapan karena kondisi masa pandemi Covid-19.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI mengapresiasi beberapa kebijakan dan program Pendidikan Kota Cilegon, diantaranya sekolah MANTAP, sebagai sekolah yang telah memparaktekkan sekolah penggerak. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Cilegon, melalui dinas pendidikan telah lebih dahulu melaksanakan sekolah penggerak, meskipun Kemendikbud RI sendiri baru merumuskan programnya pada tahun 2020. Selain itu, kebijakan dan program lain yang patut di apresiasi adalah SIRAVEK (Sehat, Inovatif, Religius, Aman, Vokasional, Etika dan Kompetitif), yang telah dipraktekkan di beberapa sekolah dan terus dikembangkan ke seluruh sekolah di Kota Cilegon.
3. Dengan memperhatikan kondisi Pendidikan di Kota Cilegon yang telah memiliki program sekolah MANTAP dan program SIRAVEK, penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cilegon dapat menjadi model penyelenggaraan pendidikan sekolah penggerak, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam hal integrasi dengan dunia industri.

### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Cilegon Provinsi Banten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah melalui Kemendikbud RI agar tunjangan guru dibayarkan tepat waktu, atau pembayarannya melekat dengan gaji pada setiap bulannya.

2. Mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi Perpres Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Fungsional Penilik, dengan penekanan substansi agar ada kenaikan tunjangan dan penilik dapat mengikuti sertifikasi. Selain itu, mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tunjangan pengawas sekolah.
3. Mendorong Kemendikbud RI untuk membantu Pemkot Cilegon dalam mengembangkan sekolah MANTAP dan SIRAVEK, serta menjadi model bagi satuan pendidikan lainnya di luar Kota Cilegon.

## **V. PENUTUP**

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Cilegon Provinsi Banten, agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 2 Feb 2021

**Ketua Tim,**

**Ttd.**

**H. Syaiful Huda**  
**A-012**